

Terpaksa Patuh



Alfie Nur Rahmi
Dosen S1 Sistem Informasi
Universitas Amikom Yogyakarta

SORE itu saya mengajak kedua anak saya untuk melihat Latihan tari tradisional di sanggar dekat rumah dengan tujuan untuk mengenalkan tari tradisional kepada mereka dan harapannya mereka akan tertarik untuk ikut berlatih dan mempelajarinya.

Setibanya di tempat, saya anjurkan untuk anak saya maju ke tengah mendekati anak-anak yang sedang latihan menari namun dia menolak. Namun tetap saja berulang kali saya "paksa" untuk ke tengah dan mengikuti gerakan tari yang sedang diajarkan, namun dia tetap menolak. Hingga akhirnya saya berhenti "memaksa"-nya. Suatu saat saya menuju motor untuk mengambilkan minum, dan saat kembali ke tempat latihan, saya terkejut karena anak saya sedang meniru gerakan tari yang sedang diajarkan. Setelah latihan selesai, saya bert-

nya padanya, apakah dia mau ikut latihan lagi minggu depan? dia mengangguk, dan saya pun merasa sangat senang melihatnya. Di hari yang sama, seorang mahasiswa bercerita kepada saya bahwa dia sedang mengalami kebingungan karena satu-satunya rencana yang sudah dia susun harus tertunda hingga tahun depan. Oleh orang tuanya dianjurkan untuk mencari kerja guna mengisi kekosongan waktu 1 tahun tersebut, namun dia juga bingung pekerjaan seperti apa yang ingin dia cari karena dia pun tak begitu yakin dengan kemampuan

yang dimiliki. Setelah mendengar ceritanya, lalu saya bertanya "passion mu apa??", lalu dia menjawab "saya suka merias, saya pernah merias seseorang dan dia suka dengan hasil riasan saya". "apa yang kamu rasakan ketika mendengar komentar positif seperti itu?", lanjut saya, "saya sangat senang", katanya. Saya melihat sorot mata yang berbeda saat itu, mata yang berbinar ketika bercerita tentang hal yang disukai olehnya, sorot mata yang tidak saya lihat ketika dia bercerita tentang mencari pekerjaan. Dari kedua cerita diatas dapat kita ambil pelajaran

bahwa anak itu tidak suka dipaksa, mereka pun ingin melakukan hal sesuai dengan keinginan mereka bukan berdasarkan perintah. Kita sebagai orang tua entah disadari atau tidak, seringkali kita memaksakan kehendak, impian maupun keinginan kita kepada anak-anak. Tanpa mempedulikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, seperti apa rencana yang sudah mereka susun, adakah kendala yang mereka hadapi, maupun perihal lain yang mungkin ingin mereka sampaikan kepada kita selaku orang tua mereka. Pembaca yang budiman, jika kita termasuk orang tua

yang memiliki model komunikasi satu arah, yakni hanya dari orang tua ke anak, maka akan menciptakan jarak dalam hubungan orang tua dan anak, sehingga membuat anak-anak terpaksa patuh atas perintah orang tua tanpa punya kesempatan untuk mengembangkan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Mungkin dampaknya tak terlihat secara fisik, namun kita tak pernah tahu dampak psikis yang dirasakan oleh anak kita. Pembaca yang hebat, tak ada kata terlambat untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, marilah kita mulai membia-



sakan komunikasi dua arah agar dapat mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak sehingga kita mampu menjadi tempat yang nyaman bagi mereka untuk bercerita dan diskusi segala rencana maupun permasalahan yang mereka hadapi. Dan semoga anak-anak kita mampu menjadi generasi bangsa yang lebih terbuka pemikirannya, generasi yang mampu menyampaikan pemikiran positif mereka dan mampu berkarier sesuai dengan passion mereka agar mampu menjadi pribadi yang sukses dan bahagia.***

LTMPPT DIGANTIKAN BP3

Skema SNPTN dan SBMPTN Tetap Ada

JAKARTA (KR) - Skema seleksi penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri secara nasional, akan diumumkan pada Desember 2023. Skemanya tak akan berbeda jauh dengan tahun lalu yang menggunakan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Demikian disampaikan Plt Dirjen Dikristek Kemendikbudristek, Nizam di Jakarta Rabu (14/9). "Seperti biasa, seperti tahun lalu pengumuman untuk seleksi masuk Perguruan Tinggi itu di bulan Desember. Jadi kita mengejar target insy Allah nanti Desember siklusnya berjalan dan nanti diumumkan secara luas mengenai seleksi tersebut," kata Nizam. Dijelaskan Nizam, perbedaan signifikan tak akan terjadi meskipun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) mulai saat ini secara resmi menjadi lembaga pengujian langsung di bawah Kementerian. Rincian skemanya akan diumumkan pada Desember 2022. LTMPPT dan

Kementerian tengah mempersiapkan seleksi tersebut. Mulai dari contoh soal, hingga kisi-kisinya. "Website juga kita siapkan agar nanti contoh soal dan kisi-kisi bisa diketahui anak-anak kita. Jadi enggak perlu galau," jelasnya. Kementerian mengalihkan tugas LTMPPT ke Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) yang berada di bawah BSKAP Kemendikbud-Ristek. Seluruh proses pelaksanaan seleksi akan tetap sama dengan sebelumnya. Dalam Merdeka Belajar Episode 22 tentang transformasi seleksi masuk PTN telah disampaikan jika SNMPTN atau jalur prestasi akan melihat 50 persen dari rata-rata rapor siswa. Dan 50 persen lainnya melihat nilai dari mata pelajaran yang mendukung pilihan siswa di universitas. "Jadi ini lebih memformulasikan dan memotivasi anak untuk bagus di mata pelajaran yang di seriusi. Dan untuk yang SBMPTN ini kita mendorong pada kritikal thinking dan bernalar, sehingga pendekatan untuk masuk PTN ini didasarkan

pada tes skolastik atau bakat dan tes kemampuan bernalar tadi," tegasnya. Selain itu pelaksanaan seleksi secara nasional adalah bentuk koordinasi dan kerja sama para rektor. Lantas, kementerian menjadi fasilitator agar pelaksanaan seleksi tersebut bisa berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Kewenangan PTN Tidak Dibatasi dalam Seleksi Mandiri Selama ini, lanjutnya, pelaksanaan seleksi tingkat nasional seperti SNMPTN dan SBMPTN diselenggarakan oleh LTMPPT. Lembaga tersebut belum memiliki payung hukum atau hanya sebagai panitia ad hoc. "Sebagai bentuk tata kelola yang baik, kementerian sejak 2 tahun yang lalu sudah melihat ini dan kita harus menata seleksi nasional. Yang harus kita lakukan itu, pelaksanaannya harusnya tidak dilakukan dalam bentuk kepanitiaan ad hoc. Apalagi LTMPPT lembaganya tidak jelas, tidak berbadan hukum, dan memang hanya melekat pada kementerian," ucap Nizam. (Ati)-f

Membantu

Sambungan hal 1

tekstil, adalah IKM yang sebagian besar dipimpin (manajer) yang perempuan. Karenanya, ancaman terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kian nyata. Minimal ada dua hal yang bisa dilakukan untuk membantu UMKM ini. Pertama, kebanyakan UMKM tidak memiliki mitra, bahkan BPS mencatat sampai 99, 07% IKM tidak menjalin kemitraan. Nah, kemitraan yang dibutuhkan bisa dalam hal pemasaran maupun perolehan bahan baku. Kemitraan yang tidak disukai adalah kemitraan tip-top tapi beli putus. Artinya, UMKM justru menjadi tempat kalau menipiskan barang produksinya untuk ditaruh di ruang jual mitra dan setiap periode tertentu mengecek apakah sudah terjual atau belum. Jika memang mitra berniat membantu, maka UMKM ini lebih menyukai jika mitra membeli produk UMKM. Hal kedua yang belum dimanfaatkan oleh UMKM adalah internet. BPS melaporkan bahwa 83,61% IKM tidak menggunakan internet untuk kegiatan bisnisnya. Ironis untuk era sekarang ini. Bagaimana tidak, Kemenkominfo tahun lalu melaporkan bahwa lebih dari 89% penduduk Indonesia sudah menggunakan smartphone. Hal ini didorong oleh rendahnya biaya internet. Sayangnya, jenis penggunaan internet utama adalah untuk media sosial dan menonton video online. Oleh karena itu, edukasi dalam hal penggunaan internet masih sangat diperlukan. Kegiatan pendampingan mahasiswa atau ben-

tuk pengabdian masyarakat atau MBKM yang terfokus pada peningkatan penggunaan internet untuk kegiatan usaha merupakan alternatif. Sebagai contoh, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM membuat WA grup dan Website lingkarmenoreh mempromosikan desa wisata dan potensi yang ada di 6 kalurahan di perbukitan Menoreh. Di samping itu juga melakukan training pembuatan konten media sosial bagi anak-anak muda anggota Kelompok Sadar Wisata. Kegiatan tersebut bisa dilakukan kepada UMKM dan biaya cukup murah. Bantuan ongkos kirim menjadi salah satu bantuan favorit bagi UMKM. Program Pemerintah DIY melalui SiBakul, yang menggratiskan ongkos kirim bagi UMKM kiranya bisa diterapkan di daerah yang menjadi kantong-kantong pusat UMKM. Seorang perajin di DIY menceritakan bahwa bantuan ongkos kirim ini sangat membantu ketika harus mengekspor produk ke Eropa. Hal ini terjadi pada saat pandemi tahun lalu, ketika kontainer menjadi langka karena terasap di luar negeri dan harganya pun naik lebih dari 300%. Apalagi sekarang ini jelas biaya transportasi dan pengiriman akan naik. Upaya mendorong kenaikan pembelian terhadap produk-produk UMKM kiranya bisa dilakukan dengan persuasif. Dalam masa prihatin ini, mari para konsumen untuk berpindah kepada UMKM, mencintai produk-produk UMKM. (Penulis adalah Dosen FEB UGM dan Anggota ISEI Yogyakarta)-d

Awal

Sambungan hal 1

Cahaya Supriadi membuat penyelamatan gemilang menit 35. Ia menggagalkan tembakan Zenivio Conceicao Mota dari jarak dekat dengan tepisan tangan kiri. Keunggulan Indonesia dua gol pun bertahan hingga turun minum. Babak kedua, Indonesia tak menurunkan tempo permainan. Hokky Caraka meneruskan penampilan apiknya di babak kedua. Pemain asli

Gunungkidul ini mencetak *hattrick* pada menit ke 50 kembali lewat sundulan kepala. Menerima umpan silang Robi dari sisi kanan, Hokky melompat tinggi mengguguli pemain belakang Timor Leste. Hokky pun tak kesulitan membobol gawang Timor Leste untuk ketiga kalinya. Pesta Indonesia ditutup oleh gol

Rabani pada menit ke 89. Lemparan jauh Robi Darwis berhasil disambut Rabani dengan sundulan terarah. Kemenangan ini penting bagi Indonesia untuk melawan Hongkong, Jumat (16/9). Pada papan klasemen Grup F, Indonesia menempati urutan kedua di bawah Vietnam yang menangi duel kontra Hongkong dengan skor 5-1. (Yud)-f

Airlangga:

Sambungan hal 1

High Level Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 ini mengangkat tema 'Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan'. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah penting dijalankan guna menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia untuk merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pada kesempatan ini juga dilaksanakan serangkaian implementasi aksi nyata yang dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan meliputi penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KAD), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani, penyerahan bibit cabai maupun bantuan sarana-prasana pertanian. Urgensi menstabilkan harga pangan karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasinya kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan kemiskinan. Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa dan 19,38 persen di kota. Secara umum, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 4,69 persen pada Agustus 2022 dengan inflasi pangan bergejolak telah turun menjadi 8,93 persen.

Berdasar data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September 2022, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi. Sementara itu, stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. Sedang yang masih perlu diwaspadai lagi adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. Mencermati kondisi ketahanan stok komoditas pangan, Menko Airlangga kembali mengarahkan kepada seluruh daerah untuk fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan. Di antaranya perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan pasokan komoditas. Selain itu, meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders; termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras. Selanjutnya, memperluas kerja sama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatan untuk memperlancar distribusi bahan pangan ataupun produk pertanian lainnya. Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai) pun harus dijalankan guna

mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Dalam jangka menengah, pengembangan program *closed loop* dalam hilirisasi produk hortikultura dapat terus diperluas. Ditambah juga dengan memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya *cold storage*), khususnya di daerah sentra produksi agar umur simpan lebih panjang, maupun di daerah konsumen untuk menjamin kecukupan pasokan lebih lama. "Saya kembali menekankan kepada seluruh daerah, tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri," jelas Menko Airlangga. Dalam menjaga akuntabilitas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memberikan dukungan melalui pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah. Ke depan, TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pascapenyesuaian BBM guna mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali. (Fie)-f

Mulai

Sambungan hal 1

Namun, angka tersebut belum termasuk dana kompensasi yang juga akan dibayarkan kepada Pertamina dan PLN. Bendahara Negara merinci anggaran subsidi terdiri atas kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 1,1 triliun dari Rp 138,3 triliun menjadi Rp 139,4 triliun dan subsidi listrik yang naik Rp 200 miliar dari Rp 72,3 triliun menjadi Rp 72,6 triliun. Subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kg meliputi subsidi jenis BBM tertentu yang naik Rp 600 miliar dari Rp 20,9 triliun menjadi Rp 21,5 triliun dan subsidi elpiji tabung 3 kg yang meningkat Rp 400 miliar dari Rp 117,4 triliun menjadi Rp 117,8 triliun. "Di dalam alokasi ini, kami juga sudah memasukkan cadangan 1 juta kiloliter untuk solar dan elpiji sebesar 500.000 metrik

ton," ungkap Sri Mulyani. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, subsidi energi tahun 2022 senilai Rp 502 triliun mayoritas dinikmati oleh orang kaya ketimbang kelompok miskin, sehingga jika subsidi ditambah lagi sama artinya dengan mensubsidi orang kaya. "Jadi memang kalau subsidi diberikan melalui barang dan barangnya dikonsumsi orang mampu ya kita mensubsidi orang mampu, meski memang ada juga orang tidak mampu yang merasakan tetapi porsi-sinya kecil. Ini yang perlu dipikirkan," tutur Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI beberapa waktu lalu. Ia memerinci dari subsidi solar senilai Rp 143 triliun, sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliun dinikmati dunia usaha dan

40 persen orang terkaya di Indonesia. Dengan demikian masyarakat miskin hanya menikmati porsi yang sangat kecil dari subsidi ratusan triliun tersebut, terlihat dari total volume subsidi solar sebesar 15,1 juta kiloliter, kelompok miskin hanya menikmati kurang dari 1 juta kiloliter. Kondisi yang sama juga tercermin dari subsidi Peralite senilai Rp 93 triliun, Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 86 persen atau Rp 80 triliun dinikmati 30 persen rumah tangga terkaya di Tanah Air. Jika dilihat dari volume subsidi Peralite sebesar 23 juta kiloliter, sebanyak 15,8 juta kiloliter subsidi Peralite dinikmati orang kaya, sedangkan hanya 3,9 juta kiloliter subsidi Peralite yang dinikmati golongan 40 persen masyarakat terbawah. (Ant/San)-f

Pemerintah

Sambungan hal 1

"Hasil dari kesimpulan kami, apa yang dilakukan Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Ia hanya hendak memberitahu kepada kita kalau kita harus hati-hati. (data) kita akan bisa dibobol dan sebagainya," jelas Mahfud. Meskipun begitu, Mahfud menegaskan, pemerintah tetap serius dalam menangani kasus itu. Salah satunya, dengan membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data yang akan melindungi data-data, terutama data negara dari ancaman peretasan ataupun kasus kebocoran data. Meski tidak membahayakan, pihaknya berpesan, peretasan Bjorka itu mengingatkan bangsa Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pengamanan data, baik data-data negara maupun data masyarakat. "Kami akan menjadikan ini sebagai peluang, sebagai peringatan kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati," ujar Mahfud. Mengenai pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh Bjorka itu, Mahfud menyebutkan, telah melalui perundingan yang melibatkan Menkopolkum, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Mahfud, pembentukan satgas tersebut, pertama, peristiwa peretasan terutama yang diklaim Bjorka telah mengingatkan tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih. Kedua, pembentukan satgas merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan segera disahkan DPR RI. Sejauh ini, UU PDP telah disahkan di tingkat I oleh DPR dan akan segera disahkan di tingkat II melalui sidang paripurna DPR. Menurut Mahfud, motif peretasan Bjorka bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi dan jual beli. Meskipun begitu, Mahfud menekankan kepada seluruh masyarakat, pemerintah serius dalam menangani kasus-kasus kebocoran data. Sebelumnya, Bjorka menjadi perbincangan lantaran selama 2022 mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, data pengung kartu SIM, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G Plate serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Klaim Bjorka disebarluaskan sebuah akun Twitter "Dark-Tracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter. (Ant)-d

Gubernur

Sambungan hal 1

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY Krido Suprayitno menyatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terkait izin pemanfaatan tanah kas desa. Dari pengawasan yang sudah dilakukan dalam tiga tahun terakhir, ada 24 persen pemanfaatan TKD tidak sesuai peruntukannya. Karena selama 2019 hingga 2021, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap 286 izin pemanfaatan TKD. Namun, hanya 76 persen dari jumlah tersebut yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan atau sesuai izin yang diberikan Gubernur DIY. Sedangkan sisanya ada 24 persen (84 izin) pemanfaatan TKD tidak sesuai peruntukannya. "Soal pengawasan pemanfaatan TKD di 2022 ini masih terus berjalan. Dengan begitu, hasil dari pengawasan ini nantinya baru akan dilaporkan pada akhir 2022 mendatang. Mengingat sampai saat ini pengawasan 2022 kami masih berproses, belum selesai dan kami akan melakukan monitoring serta evaluasi di Desember," terang Krido. Krido menambahkan, total izin pemanfaatan TKD yang di-

awasi selama 2019 hingga 2022 sudah mencapai 583 izin. Ratusan izin pemanfaatan TKD tersebut tersebar di 72 kalurahan di DIY. Dari hasil pengawasan terhadap 72 kalurahan sasaran, sudah memiliki rekaman identifikasi tindak lanjut. Dimana ada 18 izin yang perlu ditinjau kembali karena ditemui indikasi ketidaksesuaian. Menyikapi hal itu pihaknya memberikan surat teguran kepada kalurahan yang ditemukan pemanfaatan TKD tidak sesuai. Setidaknya, surat teguran terhadap izin pemanfaatan TKD yang tidak sesuai peruntukan sudah diberikan kepada 32 kalurahan. (Awh/Ria)-f



Prakiraan Cuaca		Kamis, 15 September 2022			
Lokasi	Pagi	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-32	60-95
Sleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-31	60-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	60-95
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-32	65-95
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-32	65-95